KERJASAMA INDONESIA DAN TAIWAN

(STUDI KASUS : *MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT)*

By:
Joice Victory Bakara[1]
jvictorry@yahoo.com
Advisor : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si
Bibliography: 18 Jurnal, 12 Buku, 25 Situs Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to find out the relationship of cooperation between Indonesia and Taiwan in Morotai Development Project that is focused on the factors behind Indonesia in cooperation with Taiwan. Morotai island is the name of an island as well as a name of a new district in the province of North Maluku. Morotai island is a strategic region that has avariety of potential especially tourism and fisheries. In 2014 through government regulation, Morotai established as one of Special Economic Zone in Indonesia. The result indicate that the cooperation between Indonesia and Taiwan in Morotai Development Projects due to the interest of each circle to benefit from the potential of Morotai as Special Economic Zones in Indonesia. Indonesia in cooperation with Taiwan due to Indonesian interests in the construction and infrastructure development, the potential of fisheries and tourism potential of Morotai

Keywords : cooperation, Indonesia and Taiwan, interdependence, Morotai Development Project, Special Economic Zone (SEZ)

[1] Mahasiswi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

I. Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam pembangunan dan pengembangan pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (*Morotai Development Project*) yang difokuskan pada fakor-faktor pendorong Indonesia bekerjasama dengan Taiwan dalam *Morotai Development Project*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Departemen Dalam Negeri 2010, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan 7.870 pulau sudah memiliki nama dan 9.634 pulau belum memiliki nama. Dari ribuan pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yang sangat berpotensi bila dikembangkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, sejak era Reformasi pembangunan nasional yang tidak merata yaitu terpusat pada pulau Jawa menyebabkan timbulnya kesenjangan pertumbuhan antar daerah.

Sejak tahun 2004, pembangunan berdimensi kewilayahan adalah salah satu strategi pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah mendorong pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi yang dibangun di berbagai wilayah potensial di Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Pada 14 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI menerbitkan UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang berpotensi.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Di dalam wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009, diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, pelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis serta diberikan fasilitas keamanan.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Strategi ini mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK kemudian menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan tersebut, serta menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional. Salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah kabupaten Pulau Morotai.

Pulau Morotai adalah sebuah Pulau di Indonesia bagian Timur di sebelah utara Kepulauan Maluku yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan berada di pesisir Samudra pasifik yang berdekatan dengan Filipina dan Republik Palau. Pulau Morotai adalah nama sebuah pulau sekaligus menjadi nama kabupaten baru sebagai bagian dari provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki potensi pariwisata sejarah terutama tempat-tempat sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Dari aspek geografis kabupaten ini khususnya pulau Morotai, memiliki posisi strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan yang terutama adalah perikanan dan kelautan, Sektor perikanan menjadi salah satu sektor andalan dari kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 mengenai peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten Pulau Morotai, menetapkan industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan mengolah ikan aneka produk olahan ikan sebagai kompetensi inti industri kabupaten Pulau Morotai. Pembangunan perikanan di wilayah ini akan dikembangkan menjadi Morotai Mega Minapolitan. Dengan potensi ini, kabupaten Pulau Morotai resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2014.[2]

Berdasarkan UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. KEK dapat terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, maupun ekonomi lain. Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari pemerintah, swasta, maupun kerjasama pemerintah dengan sumber lain.[3] Dalam pembangunan KEK Morotai Indonesia bekerja sama dengan sumber lain untuk menanamkan investasi dalam pengembangan infrastruktur khususnya Taiwan.

Pada 13 September 2012, Indonesia dan Taiwan menandatangani *Letter of Intent (LOI)* untuk membangun zona ekonomi khusus, pelabuhan dan bandara internasional di Morotai. Selanjutnya pada tahun 2012, Indonesia bekerjasama dengan Taiwan dalam Proyek Pengembangan Wilayah Kepulauan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi. Kerjasama tersebut tertuang dalam *Memorandum of Understanding* antara *the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei* dengan *the Taipei Economic and Trade Office in the Morotai Development Project* yang ditandatangani pada 4 Desember 2012. MoU ini bertujuan untuk mendukung pembentukan KEK dengan memfasilitasi masuknya investasi di Pulau Morotai, dan untuk memfasilitasi pembangunan Pulau Morotai dalam berbagai bidang yaitu: *forest management, eco-tourism, responsible agriculture, studies,* dan *fisheries and agriculture*.[4]

Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya dengan Taiwan sejak tahun 1960. Dalam menjalankan kebijakannya, Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy* atau kebijakan satu China. Artinya, secara *de jure* Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka dari China. Kebijakan ini sesuai dengan *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani pada 8 Agustus 1990 antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang menyatakan bahwa Indonesia hanya mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan yang

[2] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Diakses dari http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8198/MOROTAI-DITETAPKAN-SEBAGAI-KAWASAN-EKONOMI-KHUSUS/. 16 November 2014

[3] UU No. 39 tahun 2009 Tentang KEK. Diakses dari http://kek.ekon.go.id/index.php/in/regulasi-dan-perundangan/doc_download/9-uu-no-39-tahun-2009.html. 16 November 2014.

[4] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Diakses dari http://www.ekon.go.id/publikasi/download/127/19/lakip-kemenko-perekonomian-tahun-2012.pdf. 17 November 2014

bersifat non pemerintah dengan Taiwan (Chinese Taiwan).[5]

II. Hasil dan Pembahasan

Kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam pembangunan dan pengembangan kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan Indonesia

2.1 Kebijakan Pengembangan Daerah Indonesia

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kesenjangan antar wilayah masih menjadi permasalahan yang utama dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sistem yang sentralistik telah menyebabkan pembangunan lebih kepada pendekatan sektoral, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, keragaman daerah diabaikan, dan ketidakadilan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2005 sampai 2008 cukup signifikan, yaitu dari 5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antar wilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali.

Kontribusi provinsi-provinsi Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional adalah 67,48 persen, wilayah Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6 persen, serta Papua, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing hanya mencapai kurang dari 2 persen.[6] Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan berbasis pulau menjadi arah baru dalam pengembangan daerah pada kurun waktu 2009-2014.

Pendekatan kewilayahan berbasis pulau sejalan dengan desain besar pembangunan jangka panjang yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Pendekatan kewilayahan ini ditetapkan dengan strategi pembangunan regional yaitu[7] (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar pulau Jawa-Bali dan Sumatera, dengan tetap menjaga pertumbuhan di pulau Jawa-Bali dan Sumatera; (2) meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik; (3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; (4) mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; dan (5) mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Pada 14 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI menetapkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang berpotensi. Pada 20 Mei 2011, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga meluncurkan kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan

[5] Hubungan Luar Negeri RI –China Taipei (Taiwan). Diakses dari http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf. 17 November 2014

[6] Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia Diakses dari www.setneg.go.id/images/stories/.../jurnalnegarawan/.../20_artikel5.pdf pada 18 November 2014

[7] *Ibid.,*

Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthough*) yang memuat strategi peningkatan nilai wilayah, pembangunan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia serta pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK yang berorientasi inovatif. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu:

- Koridor ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta sebagai lumbung energi nasional
- Koridor ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional
- Koridor ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional
- Koridor ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahn hasil pertanian, perkebunan perikanan migas dan pertambangan nasional
- Koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.
- Koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan, investasi atau penanaman modal asing mengambil peranan penting sehingga kebijakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada suatu daerah diharapkan dapat menarik banyak investasi. Peran penting Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi yang pesat sudah dimulai sejak era Orde Baru. Dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi upaya awal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi yang baik di Indonesia. Pada 29 Maret 2007, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, tidak membeda-bedakan investor serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.

Modal asing yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, mendorong tumbuhnya bisnis, adanya transfer teknologi dari investor, dan terciptanya lapangan pekerjaan. Untuk meningkatkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia diperlukan adanya pengaturan pemerintah yang konsisten dan terpadu sehingga dapat memberikan keuntungan bukan hanya pada para investor tetapi juga kepada pemerintah Indonesia khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.[8]

Arus masuk penanaman modal atau yang sering disebut dengan investasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Modal yang ditanamkan oleh investor di daerah akan mendorong terjadinya diversifikasi produksi dan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi.[9] Secara teoritis, setelah terjadinya diversifikasi maka akan membuka banyak alternatif lapangan pekerjaan, kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut maupun daerah sekitarnya.

[8] Aminuddin Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 46
[9] Pheni Chalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya. Hal. 126

Kepulauan Maluku yang terdiri dari dua provinsi yaitu provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara adalah salah satu wilayah yang paling sedikit mendapatkan aliran investasi khususnya penanaman modal asing bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Tabel 4.1 Nilai Investasi di Indonesia Berdasarkan Wilayah (juta US$)

Nama Wilayah	2010	2011	2012	2013
Sumatera	747,1	2.076,6	3.729,3	3.395,3
Jawa	11.498,8	12.324,5	13.659,9	17.326,4
Bali & Nusa Tenggara	502,7	952,7	1.126,6	888,9
Kalimantan	2.011,4	1.918,8	3.208,6	2.773,4
Sulawesi	859,1	715,3	1.507	1.498,2
Maluku	248,9	141,5	98,8	321,2
Papua	346,8	1.345,1	1.234,5	2.414,2

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan tabel diatas, Maluku adalah wilayah di Indonesia yang paling sedikit mendapatkan aliran investasi pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2013. Nilai Investasi yang masuk ke Maluku hanya berkisar 0,4 persen sampai 1,5 persen dari total keseluruhan jumlah investasi yang masuk ke wilayah Indonesia.

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang termasuk dalam Pemetaan Koridor ekonomi kepulauan Maluku dalam kebijakan MP3EI selain provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan provinsi Maluku. Koridor ekonomi ini ditetapkan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Pada Koridor ekonomi Maluku yang terdiri dari dua kota pusat ekonomi yaitu berada di Sofifi (ibukota Maluku Utara) dan Ambon (ibukota Maluku) difokuskan kepada aktivitas perikanan karena perairan kepulauan Maluku yang memiliki potensi sangat besar dibandingkan perairan di wilayah lainnya.

Potensi perikanan di perairan Maluku yang sangat besar menjadikan wilayah ini khususnya provinsi Maluku didesain sebagai cadangan perikanan nasional. Sedangkan wilayah perairan provinsi Maluku Utara yang tidak memiliki potensi sebesar wilayah perairan provinsi Maluku didesain sebagai tempat untuk produksi dan distribusi produk perikanan. Pembangunan perikanan di Maluku Utara akan dikembangkan menjadi Morotai Mega Minapolitan.[10]

Penetapan salah satu wilayah kabupaten Pulau Morotai tepatnya di kecamatan Morotai Selatan seluas 1.101,76 ha sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2014 merupakan salah satu komponen pendukung kebijakan pendekatan kewilayahan pemerintah yang bertujuan untuk menarik banyak investasi terutama penanaman modal asing (PMA) di provinsi Maluku Utara. Kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam pengembangan kabupaten Pulau Morotai yang ditandai dengan penandatanganan MoU dan juga kerjasama pihak swasta Indonesia yaitu PT Jababeka dengan Taipei Economic Trade Office (TETO) pada tahun 2012 menyebabkan meningkatnya investasi ke wilayah ini.

[10] Indonesia Master Plan Accelaratian and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025. Diakses dari www.aseanbriefing.com. 20 Maret 2015

Grafik 2.1 Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Maluku Utara

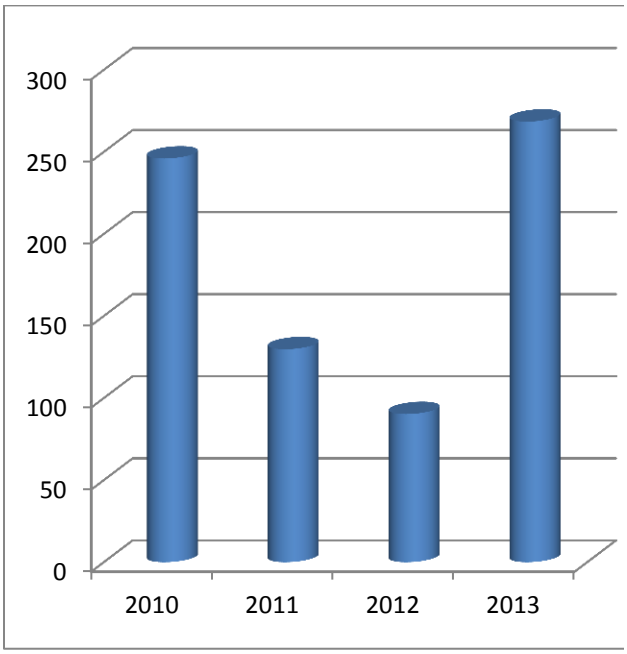

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Berdasarkan tabel diatas perkembangan realisasi investasi penanaman modal asing di provinsi Maluku Utara mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, nilai investasi mencapai 246 juta US$ yang mengalami penurunan pada tahun berikutnya yang masing-masing pada tahun 2011 menjadi 129,8 juta US$ dan pada tahun 2012 menjadi 90,3 US$. Pada tahun 2013, investasi penanaman modal asing meningkat sampai 297 persen dari jumlah investasi tahun 2012 yaitu mencapai 268.5 juta US$.

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Pada dasarnya penetapan wilayah kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tidak terlepas dari potensi yang dimiliki wilayah ini terutama bidang perikanan. Pemerintah mencanangkan pembangunan perikanan di Maluku Utara akan dikembangkan menjadi Morotai Mega Minapolitan. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai diproyeksikan dapat menyerap 30, 44 triliun rupiah dari sektor industri pengolahan ikan, manufaktur, logistik, dan pariwisata. Dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai juga mampu menyerap sebanyak tiga puluh ribu tenaga kerja.[11]

Penetapan wilayah kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk membuat lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi terutama penanaman modal asing. Pembangunan dan pengembangan wilayah kabupaten Pulau Morotai diperkirakan membutuhkan nilai investasi mencapai sebesar 6,8 triliun rupiah untuk membangun kawasan ini yang meliputi infrastruktur, perikanan, dan pariwisata.[12]

2.1.1 Infrastruktur

Penetapan wilayah kabupaten Pualu Morotai sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa zona yaitu resort, pariwisata, bisnis, pusat logistik, dan industri perikanan memerlukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kawasan tersebut. Pulau Morotai sebagai kabupaten baru di provinsi Maluku Utara, memerlukan modal untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung dalam penetapannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang memiliki potensi besar pada sektor pariwisata dan perikanan membutuhkan sarana-sarana yang mendukung untuk

[11] Agus Tony Poputra. *Potensi Investasi KEK dan Pemerintahan Baru*.Universitas Sam Ratulangi.
[12] *Ibid.,*

memajukan sektor andalan tersebut, seperti jalan, fasilitas penginapan/pemondokkan, fasilitas makanan dan minuman, fasilitas pendukung dan hiburan, fasilitas pengangkutan/transportasi seperti pelabuhan dan bandara, serta sarana pendukung lainnya. Salah satu sarana yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah pembenahan bandara dan pelabuhan.

Pulau Morotai memiliki bandara yang merupakan bandara yang juga digunakan sekutu pada Perang Dunia II yaitu Bandara Pitu Trip Daruba. Bandara Pitu Trip Daruba kemudian resmi berganti nama menjadi bandara Leo Wattimena pada tahun 2012. Nama Leo Wattimena disepakati untuk mengenang pejuang asal Maluku yang menjabat sebagai Wakil Panglima II Komando pembebasan Irian Barat. Bandara Leo Wattimena memiliki tujuh jalur landasan pacu seluas 15 hektar dengan panjang masing-masing 2400 meter. Namun, saat ini Bandara Leo Wattimena belum menjadi bandara komersil yang memiliki penerbangan yang rutin melainkan milik instansi militer yaitu dikelola oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk pertahanan keamanan udara.

Dalam PP no. 50 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, bandara yang terletak di kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai ini termasuk dalam kebijakan geostrategis yang dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung kawasan dalam rangka peningkatan peran wilayah Morotai sebagai hubungan internasional di kawasan timur Indonesia. Sehingga, pemerintah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur bandara ini yang saat ini hanya mampu menampung pesawat kecil manjadi bandara komersil yang bertaraf internasional.

2.2.2 Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 mengenai peta panduan pengembangan kompotensi inti industri kabupaten Pulau Morotai menetapkan industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan mengolah ikan menjadi aneka produk olahan ikan. Kompetensi inti industri pengolahan ikan tersebut ditetapkan untuk mencapai sasaran pengembangan baik sasaran jangka menengah dan sasaran jangka panjang.

a) Sasaran Jangka Menengah (2014-2018)
    1. Terbentuknya dua Kelompok Usaha bersama (KUB) pengolahan *fillet* ikan tuna pada tahun 2015
    2. Tercapainya produksi *fillet* ikan tuna sebesar 50 ton pada tahun 2018, dan
    3. Berkembangnya pangsa pasar domestik dan ekspor (Taiwan dan Korea)

b) Sasaran Jangka Panjang (2014-2025)
    1. Berkembangnya diversifikasi produk pengolahan ikan tuna
    2. Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan
    3. Tercapainya sertifikasi mutu produk olahan ikan, dan
    4. Terbangunnya kerjasama dengan industri domestik dan internasional.

Pada daerah penangkapan di Morotai, karakteristik perairan pesisir dan laut pulau Morotai secara teknis sangat layak untuk pengembangan kegiatan budidaya laut seperti rumput laut, *finfish* (Ikan Kerapu, Kakap, Bawal Bintang dll), *Crustacea* (Lobster), kerang (tiram mutiara, kerang hijau). Wilayah yang potensial untuk kegiatan ini adalah daerah sekitar teluk di pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten Pulau Morotai. Secara spasial kawasan potensial untuk pengembangan kegiatan usaha budidaya laut terbagi sembilan zona

namun dengan pertimbangan beberapa aspek pendukung, maka kawasan yang paling potensial untuk pengembangan budidaya laut hanya ada sebanyak enam zona/kawasan yaitu berada di kawasan selatan dan barat daya Pulau Morotai, antara lain[13]:

1. Zona budidaya I meliputi Pulau zum-zum, Pulau Lunglung, Pulau Ruberube, Pulau Rukiruki dan Pulau Bobongono
2. Zona budidaya II meliputi Pulau Kokoya, Pulau Kolorai, Pulau Dodola Kecil dan Pulau Dodola Besar
3. Zona budidaya III meliputi Pulau Pelo, Pulau Galogalo Besar, Pulau Galogalo Kecil, Pulau Loleba Besar, dan Pulau Loleba Kecil
4. Zona budidaya IV meliputi Pulau Ngelengele Besar, Pulau Ngelengele kecil, dan Pulau Tuna (pulau Burung)
5. Zona budidaya V meliputi Dowongikokotu di selatan hingga Pulau Kacuwawa di utara
6. Zona budidaya VI meliputi Pesisir Wayabula, dari Tanjung Wayabula hingga Pulau Kacuwawa

Dengan potensi perikanan yang dimiliki kabupaten Pulau Morotai tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menetapkan Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Megaminapolitan dimana merupakan bagian tindak lanjut implementasi dari pengembangan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Konsep kawasan Megaminapolitan merupakan bentuk pendekatan yang berupa pemusatan kegiatan perikanan pada suatu kawasan tertentu, dengan memberdayakan subsistem-subsistem agrobisnis kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir serta jasa penunjang yang saling mendukung. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengharapkan nilai potensi perikanan kabupaten Pulau Morotai dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga akan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional. Adapun rencana detail Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai yang ditetapkan[14], yaitu

- Kawasan Minapolitan Tilley *(Minapolitan Integrated Zone)*: sebagai pusat pengolahan hasil perikanan budidaya serta pemasaran hasil pengolahan**.** Pusat kegiatan berada di Kawasan Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, yang merupakan pusat Kawasan Minapolitan Kabupaten Pulau Morotai.
- Pusat Budidaya Laut dan Taman Wisata Bahari *(Marine Aquaculture and Tourism Park)*: sebagai zona perikanan budidaya dan pariwisata. Pusat kegiatan diarahkan kepada pengembangan gugusan pulau-pulau yang berada di sebelah barat Pulau Morotai, sebelah timur Tanjung Lifao, sebelah timur Desa Buho-buho dan sebelah timur Desa Sakita dan Kenari.
- Pusat Pengembangan Bioteknologi Kelautan *(Marine Biotechnology Park)*: Pusat kegiatan berada di Kawasan Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat
- Kawasan Minapolitan Pulau RAO *(Rao Minapolitan Park)*: sebagai pusat kegiatan produksi hasil kegiatan kelautan dan perikanan. Pusat kegiatan berada di sebelah

[13] Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dari http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=550 pada 28 Februari 2015.

[14] *Ibid.,*

utara Pulau Rao yaitu kawasan Tanjung Papaya, Desa Loumadoro

- Pusat Industri Pengolahan Perikanan *(Fisheries Technopark Industries)*: sebagai pusat pelabuhan dan pemasaran hasil laut baik skala nasional maupun internasional terutama untuk komoditas ikan Tuna. Pusat kegiatan di Desa Bere-bere, Desa Sakita dan Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara
- Taman Wisata Laut *(Marine Ecotourism Park)*: sebagai kawasan taman wisata laut dengan jenis kegiatan wisata bahari seperti wisata pantai, menyelam dan snorkeling. Dipusatkan di Tanjung Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, termasuk kawasan di sekitar Pulau Mitita
- Pusat Industri Energi Kelautan Terpadu *(Marine and Energy Industry Integrated Zone)*: sebagai pusat-pusat energi kelautan (pembangkit energi) yang dapat dikembangkan seperti energi panas laut *(ocean thermal),* energi pasang surut *(tidal energy),* energi gelombang *(wind wave energy)* dan energi arus laut *(current energy)*. Pusat kegiatan berada di wilayah Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya yaitu di wilayah pesisir Tanjung Sopi.

2.2.3 Pariwisata

Pengembangan sektor Pariwisata pada suatu daerah merupakan suatu sektor yang mempunyai banyak kaitan dengan sektor-sektor lain, sehingga pengembangan sektor pariwisata akan terus memacu perkembangan sektor lainnya dan membawa dampak yang luas terhadap perekonomian daerah tersebut. Pengembangan pariwisata di kabupaten Pulau Morotai didasarkan pada beberapa faktor potensi kepariwisataan yang menjadikannya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai, mulai dari wisata sejarah, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata alam.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki empat objek wisata utama. Pertama, adalah pemanfaatan sejarah Perang Dunia II (wisata sejarah). Pulau Morotai pada Perang Dunia II menjadi pangkalan Sekutu di Asia Pasifik untuk menghadapi Jepang yang menyebabkan Pulau Morotai memiliki arti sangat penting bagi Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya pada era perang Pasifik (1941-1945).

Amerika Serikat menjadikan Morotai sebagai tempat konsolidasi ratusan ribu pasukan darat, laut, dan udara Amerika Serikat untuk melancarkan serangan balasan pada Jepang melalui Filipina.[15] Sehingga masih terdapat peninggalan-peninggalan berupa tank atau kapal selam yang tenggelam di dasar perairan Pulau Morotai yang menarik untuk wisata selam (*diving*), puing-puing pesawat tempur serta bunker tempat persembunyian tentara sekutu. Pada tahun 2012, Pemerintah provinsi Maluku utara telah membangun museum Perang Dunia II di Morotai yang diresmikan bersamaan dengan penyelenggaraan acara puncak Sail Morotai.

Objek wisata kedua adalah pulau Sum-Sum. Pulau Sum-Sum yang terletak tiga mil di depan kota Daruba merupakan pulau kecil dengan panorama alam pantai pasir putih yang dijadikan sebagai Pusat Komando dan Pusat Pertahanan Tentara Amerika Serikat oleh Jenderal Douglas Mc Arthur. Di dalam pulau ini terdapat Goa pusat komando, tempat pendaratan amphibi dan juga terdapat Monumen Mc Arthur.

Objek wisata ketiga adalah pulau Dodola. Pulau Dodola terdiri dari Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil yang akan tersambung dengan hamparan pasir

[15] Kompas. *Opcit.,* Hal. 653

putih yang indah saat air surut. Pada masa Perang Dunia II, pulau ini dijadikan sebagai tempat peristrahatan Panglima Sekutu di Asia Pasifik. Di pulau Dodola terdapat Taman Laut Dodola yang menawarkan rekreasi selam (*diving*) dan juga terdapat panorama pasir pantai berpasir putih sepanjang 16 km.[16]

Objek wisata keempat adalah di Pulau Ngelengele. Pulau Ngelengele terdiri dari pulau Ngelengele Besar dan pulau Ngelengele Kecil yang berada di kecamatan Morotai Selatan Barat dan berjarak lima mil dari Pelabuhan Daruba. Di pulau yang dikembangkan sebagai budidaya mutiara ini, wisatawan dapat menikmati rekreasi menyelam karena terdiri dari keindahan berbagai jenis terumbu karang dan ikan hias, kerang kima, bintang laut.[17]

Kabupaten pulau Morotai juga memiliki banyak pulau lainnya yang juga memiliki potensi pariwisata yaitu pulau Kolorai yang berada dekat dengan pulau Dodola, pulau Mitita dan pulau Galo-galo yang terletak di selatan kabupaten Pulau Morotai, pulau Kokoya yang berjarak 3 mil dari pulau Daruba, pulau Pasir Putih yang berada di antara pulau Matita dan pulau Kokoya, pulau Kappa-kappa yang berjarak 1,5 mil dari pulau Daruba, pulau Rao yang merupakan pulau kedua terbesar di kabupaten Pulau Morotai, serta pulau Tabailange yang terletak di sebelah timur kabupaten Pulau Morotai.

2.2 Taiwan sebagai Mitra Penting Indonesia

2.2.1 Perdagangan dan Investasi

Taiwan menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam perdagangan dan investasi yang dimulai sejak relokasi perdana industri manufaktur Taiwan ke ASEAN pada tahun 1970. Sejak akhir tahun 1990, kawasan ASEAN menggantikan kawasan Amerika Utara sebagai tujuan utama dari ekspor Taiwan.[18] Pada tahun 2012, jumlah investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) Taiwan di dunia mencapai 77,393 milyar US$ dengan 20,925 milyar US$ ditanamkan di kawasan ASEAN.[19] Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan kerjasama Indonesia dan Taiwan tetap terjalin yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dalam perdagangan maupun investasi.

Diagram 4.1. Jumlah Investasi Taiwan di Negara-negara ASEAN (milyar US$)

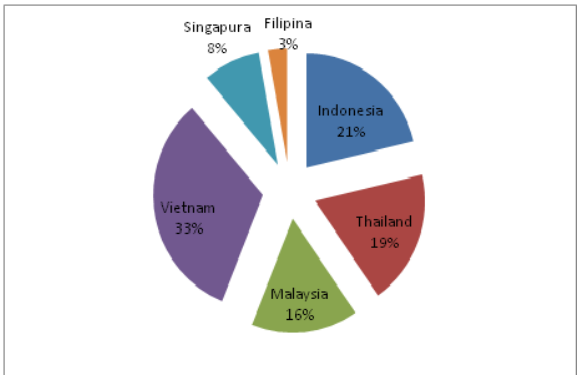

Sumber: www.trade.gov.tw

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, Indonesia menempati urutan ke dua terbesar setelah Vietnam sebagai negara yang mendapat aliran investasi Taiwan di negara-negara kawasan ASEAN. Total keseluruhan investasi Taiwan di enam negara-negara kawasan ASEAN yaiu Vietnam, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand dan Malaysia mencapai 65,98 juta US$ dengan nilai

[16] Data Base Pariwisata Maluku Utara. Diakses dari http://visitmalut.com/press.php?file=Data+Base+Pariwisata+Maluku+Utara.pdf. 11 Mei 2015

[17] *Ibid.,*

[18] Zhao Hong. 2011. *Taiwan-ASEAN Economic Relations in the Context of East Asian Regional*. Integration. National University of Singapore

[19] United Nation Conference on Trade and Development. Diakses dari http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_TWN.xls. 28 Maret 2015

Investasi Taiwan di Indonesia sebesar 13,94 milyar US$.

2.2.2 Sektor Perikanan

Taiwan adalah pulau berpenduduk padat yaitu dengan luas wilayah 36.193 km² yang dihuni oleh populasi lebih dari 20 juta orang. Taiwan juga merupakan pulau dengan sumber daya alam yang terbatas yaitu wilayah yang potensial untuk area penanaman hanya sepertiga dari total keseluruhan luas wilayah Taiwan. Sedangkan dua pertiga wilayah pulau ini tidak datar dan terdiri dari banyak barisan pegunungan. Dikelilingi oleh lautan dan terbatasnya sumber daya alam, menjadikan pembangunan industri perikanan merupakan hal yang penting bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Taiwan.

Sejak tahun 1951, pemerintah Taiwan mendukung untuk meningkatkan penangkapan ikan dan membangun industri perikanan. Dukungan ini ditunjukkan pemerintah dengan memberikan pinjaman uang bagi para nelayan untuk meningkatkan keahliannya dan memberikan subsidi bahan bakar.[20] Industri penangkapan ikan tuna adalah industri penangkapan ikan terutama bagi Taiwan. Industri perikanan Taiwan khususnya pada penangkapan ikan tuna diklasifikasikan berdasarkan jarak area penangkapan menjadi tiga yaitu industri perikanan pantai (*coastal fisheries*), industri perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*), dan industri perikanan laut dalam (*deep-sea fisheries*). Pada awalnya, penangkapan ikan tuna untuk industri terbatas hanya pada Laut China Selatan dan pada tahun 1963, Taiwan memperluas area penangkapan ikan sampai ke Pasifik.[21] Sejak tahun 1970-an Taiwan menjadi salah satu saingan utama Jepang dalam penangkapan ikan tuna di perairan Pasifik.[22] Adanya konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982, menyebabkan menurunnya area penangkapan ikan Taiwan.

UNCLOS (*United Nation Convention Law of Sea*) mengatur mengenai kewenangan suatu negara pantai akan laut. Setiap negara pantai (*Coastal State*) memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam laut sejauh 200 mil yang disebut dengan Zona Ekonomi Khusus (*Exclusive Economic Zone*).[23] Laut Taiwan yang dibatasi negara lain yaitu sebelah barat (Selat Taiwan) berada di selatan dan timur laut China serta sebelah selatan (Selat Luzon) berada di timur perairan Filipina menyebabkan Taiwan hanya memiliki garis pantai sejauh 1,566 km.[24] Sehingga, Taiwan membangun kerjasama dengan negara lain maupun bergabung dengan organisasi perikanan regional untuk memperluas area penangkapan ikan bagi industrinya.

Taiwan mulai masuk dalam sebuah organisasi perikanan regional dimulai pada tahun 1996 yaitu Taiwan dengan sebutan "*Fishing Entity of Chinese Taipei*" menjadi anggota pendiri *International Scientific Comitee for Tuna and Tuna-like Species in North pacific Ocean.* Dengan dukungan Australia, Taiwan sebagai "Fishing Entity of Taiwan" berhasil bergabung dengan *the Extended Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* pada tahun 2002.

[20] Shu Man Chang. 2005. *The Taiwan Buyback Policy of Offshore Fishing Vessels*. Eastern Asia Society, Vol 5. Hal. 2405

[21] Sun Chi Lu and Su Zan Yeh. 1992. *Taiwan's Yellowfin Tuna fisheries in The Central and Western Pacific Ocean*. Institute of Oceanography National Taiwan University

[22] Robert Gillet. 2007. *A Short History of Industrial Fishing in The Pacific Island*. Asia Pacific Fishery Commision Food and Agriculture of the United Nation.

[23] Lee Yao Hsien. *Tawan-China Fisheries joint Ventures, An Economic Quest and Assessment*. Taiwan: Chung-Hua university

[24] Fishery Policy and Management Workshop for the South Pacific Region. Diakses dari www.icdf.org.tw/web_pub/20020516163029P33-35.pdf. *8 April 2015.*

Selanjutnya yang paling sukses adalah diterimanya Taiwan sebagai anggota penuh dalam *South Pacific Regional Fisheries Management Organizatuon* (SPRFMO) pada tahun 2012. Dengan menjadi anggota, Taiwan dapat memperluas aktivitas perikanannya di kawasan Pasifik Selatan.[25]

Kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam *Morotai Development Project* tidak terlepas dari potensi utama yaitu perikanan yang dimiliki oleh kepulauan Maluku khususnya kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 mengenai peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten Pulau Morotai menetapkan industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan mengolah ikan khususnya ikan tuna (sasaran jangka menengah) menjadi aneka produk olahan ikan sebagai kompetensi inti industri kabupaten Pulau Morotai. Dengan adanya kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam *Morotai Development Project*, Indonesia dan Taiwan masing-masing dapat memperoleh keuntungan dari kerjasama ini khususnya pada bidang perikanan.

Indonesia khususnya kabupaten Pulau Morotai dapat memperoleh keuntungan dari Industri perikanan Taiwan yang dikenal sebagai salah satu industri perikanan terbesar di dunia dengan armada penangkapan ikan perairan jauh yang terbesar di dunia. Di perairan samudera Pasifik, kapal Taiwan merupakan kapal terbesar dari kapal utama dari beberapa negara perikanan utama di dunia seperti Jepang, Korea, Spanyol dan Amerika Serikat. Taiwan memiliki banyak kapal tangkap yang menargetkan pada penangkapan ikan tuna.[26] Sedangkan Taiwan dapat memperoleh keuntungan dari potensi perikanan khususnya ikan tuna perairan Maluku dan letak strategis kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012, kabupaten Pulau Morotai memiliki 160 jenis ikan yang bernilai ekonomis dan 31 jenis ikan komersial, dengan jumlah potensi perikanan yang diperkirakan mencapai 148.473,8 ton/tahun dengan jumlah potensi lestari yang dapat dimanfaatkan sebesar 81.660,6 ton/tahun. Sedangkan untuk sektor budidaya laut, kawasan pesisir dan laut kepulauan Morotai dapat dijadikan tempat pengembangan kerapu, lobster, rumput laut, dan mutiara. Taiwan juga dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan potensi perikanan yang didukung oleh letak strategis Pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar Indonesia dengan garis pantai sejauh 311,217 km (ZEE Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Bonnie S. Glasser. 2013. Taiwan's Quest for Greater Participation in the International Community. Center for Strategic International Series.

Lee Yao Hsien. Tawan-China Fisheries joint Ventures, An Economic Quest and Assessment. Taiwan: Chung-Hua university

Pheni Chalid. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya

Robert Gillet. 2007. A Short History of Industrial Fishing in The Pacific Island.

[25] Bonnie S. Glasser. 2013. *Taiwan's Quest for Greater Participation in the International Community*. Hal. 28. Center for Strategic International Series.

[26] Warwick Gullet. 2009. *Fishing Industry Taiwan*. University of Wollongong

Asia Pacific Fishery Commision Food and Agriculture of the United Nation.

Shu Man Chang. 2005. The Taiwan Buyback Policy of Offshore Fishing Vessels. Eastern Asia Society, Vol 5.

Sun Chi Lu and Su Zan Yeh. 1992. Taiwan's Yellowfin Tuna fisheries in The Central and Western Pacific Ocean. Institute of Oceanography National Taiwan University

Warwick Gullet. 2009. Fishing Industry Taiwan. University of Wollongong

Zhao Hong. 2011. Taiwan-ASEAN Economic Relations in the Context of East Asian Regional. Integration. National University of Singapore

Buku :

Agus Tony Poputra. Potensi Investasi KEK dan Pemerintahan Baru.Universitas Sam Ratulangi.

Aminuddin Ilmar. 2004. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Internet :

Data Base Pariwisata Maluku Utara. Diakses dari http://visitmalut.com/press.php?file=Data+Base+Pariwisata+Maluku+Utara.pdf. 11 Mei 2015

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dari http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=550 pada 28 Februari 2015.

Fishery Policy and Management Workshop for the South Pacific Region. Diakses dari www.icdf.org.tw/web_pub/20020516163029P33-35.pdf. 8 April 2015.

Hubungan Luar Negeri RI –China Taipei (Taiwan). Diakses dari http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf. 17 November 2014

Indonesia Master Plan Accelaratian and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025. Diakses dari www.aseanbriefing.com. 20 Maret 2015

Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia Diakses dari www.setneg.go.id/images/stories/.../jurnalnegarawan/.../20_artikel5.pdf pada 18 November 2014

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Diakses dari http://www.ekon.go.id/publikasi/download/127/19/lakip-kemenko-perekonomian-tahun-2012.pdf. 17 November 2014

UU No. 39 tahun 2009 Tentang KEK. Diakses dari http://kek.ekon.go.id/index.php/in/regulasi-dan-perundangan/doc_download/9-uu-no-39-tahun-2009.html. 16 November 2014.

United Nation Conference on Trade and Development. Diakses dari http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_TWN.xls. 28 Maret 2015